

EDISI RABU / 03 Juni 2020

LENTERA

Inspirasi Perubahan **TODAY**HARIAN UNTUK UMUM
TERBIT SENIN - JUMAT
12 HalamanE-mail redaksi@lenteratoday.com
Redaksi 031-87854491
Iklan 031-87854491
Kantor Redaksi
Jl. Rungkut Asri Utara VI no 26
Surabaya

Segalanya adalah tentang bagaimana seseorang menempatkan diri. Wajar jika manusia berbuat kesalahan, namun seperti apa cara kita mengatasi permasalahan akan menuntun kita ke arah yang sesungguhnya.

Luna Maya, Aktris

SABAR INI UJIAN JEMAAH HAJI TAHUN INI TAK BERANGKAT



Kekecewaan tentu saja meliputi Jemaah Calon Haji (JCH) yang dijadwalkan berangkat tahun ini. Pasalnya, pemerintah resmi tidak memberangkatkan haji 1441H/2020M akibat pandemi Covid-19. Para JCH yang tertunda keberangkatannya otomatis dijadwalkan ke Tanah Suci tahun 2021 dan bakal mendapat dana manfaat senilai Rp 6 juta - Rp 16 juta dari pelunasan haji. Meski bukan satu-satunya negara yang meniadakan keberangkatan haji, namun protes keras muncul dari para wakil rakyat. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) dinilai membuat keputusan sepihak tanpa melibatkan DPR RI sebagai mitra kerja. Sabar ini ujian!

Baca Hal 11

POIN PENTING KEPUTUSAN TERKAIT HAJI 2020

- Jemaah haji regular dan jemaah haji khusus yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/202 M.
- Setoran pelunasan Bipih pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
- Nilai manfaat dari pengelolaan setoran pelunasan Bipih diberikan penuh oleh BKH kepada jemaah haji pada penyelenggaraan haji tahun 1442 H/2020 paling lambat 30 hari sebelum pemberangkatan haji kloter pertama di tahun 2021.
- Jemaah haji bisa meminta kembali setoran pelunasan Bipih.
- Pembatalan petugas haji daerah di penyelenggaraan haji tahun ini dan Bipih bis dikembalikan. Kemudian Gubernur dapat mengusulkan kembali nama petugas haji daerah untuk tahun depan.
- Pembimbing dari unsur kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) dipenyelenggaraan haji tahun ini juga batal dan Bipih juga dikembalikan. Lantas, KBIHU dapat mengusulkan kembali pembimbing pada penyelenggaraan haji tahun depan.
- Semua paspor jemaah haji, petugas haji daerah, dan pembimbing dari unsur KBIHU di penyelenggaraan haji tahun ini dikembalikan kepada pemilik masing-masing.

UPDATE PERKEMBANGAN VIRUS CORONA

| | KASUS POSITIF | SEMBUH | MENINGGAL DUNIA |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| INDONESIA | 27,549 | 7,935 | 1,663 |
| Seluruh Dunia | 6,274,136 | 2,693,995 | 375,711 |

Update : 02 Juni 2020 Pukul 15.50 PM
Sumber : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Johns Hopkins

ABNORMAL! DAYA BELI ANJLOK, INFLASI RAMADAN HANYA 0,07%

Jakarta- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat selama bulan Ramadan pada Mei 2020, terjadi inflasi hanya sebesar 0,07 % secara bulan ke bulan (mtom). Inflasi selama Januari-Mei 2020 pun tercatat berada di angka 0,90 %. Kondisi ini abnormal alias tidak biasa dibanding tahun-tahun sebelumnya, akibat anjloknya daya beli terimbas pandemi Covid-19.

"Biasanya Ramadan Idul Fitri, permintaan meningkat sehingga inflasi tinggi. Kali ini tidak terjadi karena situasi tidak biasa," ucap Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers virtual, Selasa (2/6).

Suhariyanto menyatakan nilai inflasi Mei 2020 ini kecil sekali. Ia mencontohkan inflasi Mei 2020 hanya 0,07 % dan sangat jauh dari inflasi Idul Fitri 2019 yang jatuh pada Juni dengan inflasi 0,55 %. Secara yoy nilainya hanya mencapai 2,19 % atau turun jauh dari Ramadan yang jatuh pada Juni 2019 yang masih 3,28%.

Menurut data BPS, sekitar 67 kota mengalami inflasi dan 23 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi dialami wilayah Tanjung Pandan senilai 1,2 % dan terendah terjadi di 0,01 %. Sementara itu deflasi tertinggi terjadi di Luwuk senilai 0,39 % dan terendah dialami wilayah Manado sebesar 0,01%.

Suhariyanto mencatat rendahnya inflasi di bulan Ramadan 2020 disebabkan faktor turunnya permintaan dan persoalan daya beli sebagai imbas penurunan pendapatan



Kepala BPS Suhariyanto

yang dialami masyarakat. Di sisi lain, ia menilai hal ini menjadi konsekuensi dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). "Kita semua menyadari situasi tidak biasa karena Covid-19. Tidak pasti dan banyak kejadian menyebabkan pola inflasi pada Ramadan sangat tidak biasa berbeda jauh dari tahun-tahun sebelumnya," ucapnya.

Jika dibedah lebih lanjut, komponen bergejolak atau volatile price malah mengalami deflasi 0,50 % dengan andil deflasi 0,09 %. Komponen ini pun masih mengalami inflasi secara yoy dengan angka 2,52 %. Sementara itu, harga diatur pemerintah atau administered price masih mengalami inflasi 0,67 % mtom. Inflasi inti pada Mei 2020 tercatat berada di angka 0,06 % mtom dan 2,65 % yoy.

"Menurut kelompok pengeluaran naiknya tarif angkutan udara, harga bawang merah, dan daging ayam," ucapnya.

Secara lebih rinci inflasi dari tarif angkutan udara memiliki andil 0,08 %. Menurut Suhariyanto nilai ini masih

tergolong tinggi. Sementara itu perjalanan kereta api menyumbang inflasi dengan andil 0,02 %. Nilai inflasi kelompok pengeluaran transportasi pun tercatat menjadi yang tertinggi selama Mei 2020 dengan angka 0,87 %. Andilnya 0,1 % atau paling besar dibanding 10 kelompok pengeluaran lain. "Meski pemerintah sudah mengimbau tidak mudik, masih ada penumpang yang melakukan perjalanan," ucapnya.

Sementara itu, bawang merah menyumbang inflasi dengan andil 0,06 % lantaran harganya terus merangkak naik. Daging ayam ras menyumbang andil 0,03 %. Suhariyanto menyatakan dua komoditas itu cukup tinggi kebutuhannya selama Ramadan kemarin sehingga praktis menyumbang inflasi. Posisi keduanya diikuti oleh daging sapi dan rokok kretek filter yang memberi andil inflasi masing-masing 0,01%.

Meski demikian, komponen pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau masih mengalami deflasi 0,32 % mtom dengan andil deflasi 0,08 %. Penyebabnya penurunan harga sejumlah komoditas pangan. Antara lain cabai merah dengan andil deflasi 0,07 %, telur ayam dengan andil deflasi 0,06 %, bawang putih dengan andil deflasi 0,05 %, cabai rawit dengan andil deflasi 0,03 %. Lalu bawang bombai dan gula pasir yang sempat mengalami kenaikan kini menyumbang deflasi. Masing-masing memiliki andil 0,01 %. Inflasi pada kategori pakaian dan alas kaki tercatat sangat rendah. (ist)

SURABAYA KEBUT RAMBU WAJIB MASKER DI JALAN RAYA

Surabaya- Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya terus melakukan upaya untuk memutus mata rantai Covid-19. Salah satunya dengan memasang rambu wajib masker dan stiker jaga jarak agar kesadaran warga meningkat.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Irvan Wahyu Drajat mengatakan pemasangan rambu dilakukan di titik masuk perbatasan Kota Surabaya, ruas jalan utama, fasilitas publik. "Pemasangan rambu sudah dilakuakn selama sepekan, untuk saat ini rambu wajib masker dan stiker jaga jarak telah di pasang 17 perbatasan pintu masuk Surabaya, dan 21 ruas jalan terutama serta kawasan publik, seperti Siola dan taman bungkul," kata Irvan, Selasa (2/6).

Irvan mengatakan pemasangan rambu wajib masker dan stiker jaga jarak berpacu berdasarkan Perwali 16 maupun SE No 360/4170/436.8.4/2020 terkait peningkatan kewaspadaan Covid-19 jasa transportasi, yang menyebutkan wajib memakai masker ketika keluar rumah.

Diharapkan pemasangan rambu wajib masker dan stiker jaga jarak ini bisa mamacu kedisiplinan masyarakat. Dengan banyaknya rambu warga selalu diingatkan pentingnya menerapkan protokol kesehatan khususnya memakai masker. "Kuncinya adalah disiplin dari diri sendiri. Paling tidak agar dirinya

tidak tertular covid-19 dan tidak bisa menularkan," ujar Irvan. Untuk kawasan zona merah yang telah dipasang rambu wajib masker diantaranya, Pasar Gresik PPI, Kenjeran, Manukan.

Masih Kacau

Di sisi lain, Anggota DPRD Kota Surabaya Imam Syafii menyebut penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan Pemkot Surabaya sangat kacau. Data terbaru yang dikantongi Imam, ada 18 warga yang diisolasi akhirnya dipulangkan oleh Pemkot Surabaya. Dia menyebut, dari 18 itu, 5 di antaranya ternyata positif Corona. Anggota Komisi A DPRD Surabaya ini menyebut, 18 warga itu berasal dari Kecamatan Tegalsari.

Menurut Imam, mereka diperbolehkan pulang setelah diberitahu hasil swabnya negatif. Dan esok harinya, petugas puskesmas menyatakan 5 orang di antara mereka yang sudah dipulangkan, ternyata positif Covid-19.

Kejadian tersebut dinilai Imam tidak hanya membahayakan bagi penderita Covid-19, tapi juga membahayakan warga lainnya yang bersentuhan atau berinteraksi dengan warga yang hasil swabnya dinyatakan positif.

Imam mengantongi data itu setelah mendapat laporan dari salah satu tokoh



Surabaya Kebut Rambu Wajib Masker di Jalan Raya

masyarakat di Tegalsari. Bahkan dua dari lima warga yang positif Covid-19 itu saat ini berpergian ke Madura. "Apalagi ada dua warga yang hasil swabnya positif sekarang pergi ke Madura karena orangtuanya meninggal dunia," ungkapnya.

Hotel untuk isolasi warga juga tidak jelas pelayanannya. "Ternyata hotel tidak menyediakan sabun, handuk dan perlengkapan lainnya. Tidak ada selimut dan air minum terbatas," beber Imam.

Lanjut Imam, warga juga tidak mendapatkan pendampingan dari petugas kesehatan. Warga tidak diberikan vitamin sesuai SOP penanganan pasien dalam pengawasan (PDP). Bahkan ada warga yang tidak mendapatkan makanan.

"Warga makin stres karena tidak ada kejelasan kapan hasil swab keluar. Bisa dibayangkan betapa tertekannya warga. Apalagi ada warga yang sakit typus," terangnya. (ard)

DPR: PENANGKAPAN NURHADI MOMENTUM LIBAS MAFIA PERADILAN

Jakarta- DPR RI mengapresiasi kerja jajaran KPK yang berhasil menangkap Mantan Sekjen MA, Nurhadi dan menantunya, Rezky yang menjadi buron selama 4 bulan sejak ditetapkan 13 Februari 2020 dalam kasus suap dan gratifikasi senilai Rp 46 miliar. Apalagi, kasus ini mendapat persepsi publik sebagai kasus 'orang kuat'. Diharapkan hal itu digunakan komisi anti-rasuah sebagai momentum melibas kejahatan mafia di peradilan.

"Karena yang bersangkutan dipersepsikan sebagai orang yang sulit disentuh penegak hukum terutama sewaktu masih menjadi pejabat utama MA-RI. Apalagi untuk memeriksa anggota Brimon yg menjadi pengawal di rumah Nurhadi saja KPK kesulitan," tutur Anggota Komisi III dari PPP, Arsul Sani di Jakarta, Selasa (2/6).

Namun demikian Komisi Hukum DPR RI meminta agar KPK tidak berhenti pada kasus yang menyebabkan Nurhadi menjadi tersangka saja. Kasus yang saat ini disidik hendaknya menjadi pintu masuk untuk menyelidiki kasus - kasus suap di dunia peradilan yang selama ini dipersepsikan masyarakat sebagai praktek mafia peradilan. "Meski bisa jadi istilah mafia ini tidak pas karena masih harus dibuktikan lebih lanjut," tuturnya.

Menurut Arsul, jika KPK berhasil mengembangkan kasus Nurhadi ini maka ini akan membantu dunia peradilan Indonesia untuk mendapatkan peningkatan

kepercayaan bukan saja dari masyarakat, tetapi juga dari dunia bisnis dan investor termasuk investor asing.

"Nah, karena itu tidak heran jika banyak elemen masyarakat juga berharap KPK tidak berhenti dalam kasus Nurhadi ini pada dugaan suap yang menyebabkannya menjadi tersangka," paparnya. Untuk itu, Arsul menyarankan kepada KPK apabila Nurhadi mau bekerja sama, bersifat kooperatif, untuk membongkar kasus-kasus serupa.

Seperti diketahui, KPK menangkap eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, Senin (1/6/2020) malam.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, Nurhadi dan Rezky ditangkap di sebuah rumah, kawasan Simprug, Jakarta Selatan. "Tidak terkonfirmasi kalau rumahnya siapa. Yang jelas, saat digeledah kedua tersangka ada di sana, bersama istri dan anak, cucunya serta pembantu," ujar Nawawi.

Nurhadi dan Rezky merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di MA. Keduanya berstatus buron sejak Februari 2020 lalu. Selain Nurhadi dan Rezky, KPK juga masih memburu seorang tersangka lain dalam kasus ini yaitu Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto. KPK menetapkan Nurhadi, Rezky Herbiyono dan Hiendra Soenjoto sebagai tersangka



Tersangka korupsi eks-Sekjen MA, Nurhadi saat digelandang ke KPK

kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Dalam kasus itu, Nurhadi melalui Rezky diduga telah menerima suap dan gratifikasi dengan nilai mencapai Rp 46 miliar. Menurut KPK, ada tiga perkara yang menjadi sumber suap dan gratifikasi yang diterima Nurhadi yakni perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, sengketa saham di PT MIT, dan gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan. Dalam perkara PT MIT vs PT KBN, Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direktur PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu.(ist)

DPRD SURABAYA MINTA HASIL SWAB MASSAL DISAMPAIKAN CEPAT

Surabaya - Pimpinan DPRD Kota Surabaya berharap laporan hasil tes swab Covid-19 massal terhadap warga di Surabaya, Jawa Timur bisa disampaikan dengan cepat, akurat dan detail. Wakil Ketua DPRD Surabaya A.H. Thony mengatakan, pihaknya menyoroti beberapa kali dilakukan swab massal di Kota Surabaya, namun hasilnya lama.

"Saya sempat mempertanyakan hasil swab mobil PCR BNPB itu kepada Dinkes Surabaya. Namun pihak Dinkes menyatakan belum menerima," ujar dia Selasa, (2/6).

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga sempat mempertanyakan hasil swab itu kepada Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Surabaya, tetapi jawabannya juga sama.

"Artinya hasil swab itu tidak bisa dilaporkan dengan cepat. Saya melihat ini bagian penting yang harus kita soroti bahwa ada kelambanan dalam hal ini. Jangan sampai ada kesan menghambat data hasil identifikasi swab yang ada di Surabaya," kata dia.

Untuk itu, Thony menyatakan pihaknya dalam waktu dekat ini akan berkoordinasi dan menggelar audiensi dengan Pemerintah Provinsi Jatim yang berkoordinasi langsung BNPB Pusat. "Saya akan coba koordinasi dengan Pemprov. Kami akan audiensi dengan beliau-beliau yang ada di sana untuk mendapatkan pen-

jelasan itu," kata dia.

Sementara itu, ratusan warga Surabaya melakukan rapid test dan tes swab massal yang digelar oleh Pemkot dan Badan Intelijen Nasional (BIN) di sekitar kompleks Masjid Al Akbar, Selasa (2/6).

"Pasien yang direkomendasi dari pihak puskesmas. Target 500 orang kuotanya," kata Kepala Puskesmas Kebonsari, Gayungan dr Reyner.

Sementara itu, Kepala Poliklinik BIN dr Wulan mengatakan ada 503 warga yang mendaftar. Hingga pukul 13.50, pihaknya sudah melakukan rapid test terhadap 468 warga. "Dari sementara 468 warga yang dirapid test, ada 95 yang reaktif. Yang reaktif langsung kami tes swab," kata dr Wulan.

Mengutip peta sebaran Corona COVID-19 di laman lawancovid-19, Selasa (2/6), berdasarkan sumber dinas kesehatan Kota Surabaya, total pasien positif Corona COVID-19 mencapai 2.633 orang. Rinciannya 2.535 orang dari Surabaya dan 98 orang dari luar Surabaya hingga 31 Mei 2020.

Total pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dalam perawatan sebanyak 2.147 orang. Pasien sembuh dari Corona COVID-19 di Surabaya bertambah menjadi 223 orang dan dari luar Surabaya sebanyak 17 orang. Sementara itu, pasien meninggal



Rapid test massal oleh Pemkot Surabaya dan BIN di Surabaya

karena Corona COVID-19 bertambah menjadi 240 orang dan dari luar Surabaya sebanyak enam orang.

Total pasien dalam pengawasan (PDP) terkait Corona COVID-19 mencapai 3.057 orang. Dari jumlah tersebut, PDP dalam pengawasan sebanyak 1.929 orang dan PDP sembuh mencapai 1.125 orang. PDP meninggal ada tiga orang. Selain itu, total kumulatif ODP mencapai 3.711 orang. Rinciannya ODP dipantau sebanyak 506 orang dan ODP selesai dipantau ada 3.205 orang.

Di Surabaya, pasien positif Corona COVID-19 terbanyak ditemui di Surabaya Timur yang mencapai 885 pasien, di Surabaya Selatan sebanyak 532 pasien dan Surabaya Utara sebanyak 518 pasien. (ard,ist)

PEMROV JATIM BANTU PONPES PERSIAPKAN NEW NORMAL

Surabaya- Pemerintah Provinsi (Pem- prov) Jawa Timur (Jatim) siap untuk memberikan fasilitasi bagi pondok pesantren (Ponpes) yang akan menyambut santri untuk kembali belajar dan melaku-kan aktivitas dalam koridor new normal di tengah pandemi Covid-19.

"Sesuai dengan maklumat PWNU tentang pembukaan pembelajaran santri di pesantren, bahwa hal tersebut menjadi kewenangan masing-masing pengasuh pondok pesantren. Namun, sesungguhnya mereka santri pondok yang tidak ada pendidikan formal dan hanya program ngaji. Mereka bisa langsung masuk ke pondok dengan memperhatikan protokol kesehatan," kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Selasa (2/6).

Sebagaimana diketahui, santri yang menjadi siswa di sekolah atau madrasah tetap mengikuti kegiatan belajar mengajar per 2 Juni 2020, namun dengan belajar di rumah.

Namun, bagi santri yang mengikuti pendalaman pembelajaran keagamaan--tidak mengikuti program pendidikan formal—saat ini siap untuk kembali ke pesantren. Sebab tahun ajaran baru biasanya dilakukan di bulan Syawal tahun Hijriah.

Bagi pondok pesantren yang siap untuk menerima santri kembali belajar, Pemprov Jatim siap memberikan mitigasi dan sinergi agar bisa menerapkan protokol kesehatan

secara baik. Lebih lanjut Pemprov Jatim sudah menyiapkan sejumlah rencana untuk bisa mendukung dan membantu pesantren untuk bisa menegakkan protokol kesehatan.

Gubernur akan memberikan bantuan alat perlindungan diri (APD) ke setiap poskestren di Jawa Timur dengan total bantuan APD yang akan diberikan sebanyak 34.650 buah. Bantuan APD untuk 1.286 pondok yang di dalamnya terdapat poskestren.

Selain itu, Pemprov Jatim juga akan membagikan vitamin C pada santri dengan total bantuan sebanyak 92.836 blister. Dan, juga untuk untuk ustadz dan ustadzah sebanyak 52.759 blister. Masker juga menjadi item yang juga akan didistribusikan pada pondok pesantren yang siap untuk menyambut santrinya untuk memulai kegiatan belajar dan mengaji.

Total bantuan masker yang akan disalurkan ke pondok pesantren ada sebanyak 464.182 buah untuk santri dan juga sebanyak 52.759 buah untuk ustadz dan ustadzah. Selain itu bantuan berupa tempat cuci tangan sebanyak 18.564 buah juga akan didistribusikan ke pondok pesantren. Juga sebanyak 981.122 botol hand sanitizers untuk santri dan ustadz ustadzah yang ada di pesantren-pesantren di Jawa Timur.

Dan, agar pondok pesantren bisa selalu terjaga untuk kebersihannya dari



Pemrov Jatim bakal bantu Ponpes agar santri dapat belajar kembali dengan aman saat new normal

virus, Pemprov Jatim juga akan menyebar sprayer dan desinfektan yang penyemprotannya diharapkan akan dilakukan oleh warga sekitar melalui program cash for work.

Terakhir, para ustadz dan ustadzah juga disiapkan bantuan sembako. Mereka adalah ustadz dan ustadzah yang bermukim. Total ada sebanyak 44.845 orang ustadz dan ustadzah yang akan mendapat bantuan sembako.

"Bantuan ini kami rencanakan untuk mendukung penegakan protokol kesehatan. Agar setiap pesantren bisa melakukan persiapan untuk dimulainya proses belajar mengajar di pesantren," kata Khofifah. Khofifah berharap kegiatan belajar mengajar santri di pesantren bisa tetap terjaga dan aman dari penyebaran pandemi Covid-19. (ufi,ist)

HARGA SERING JEBLOK, WALIKOTA MADIUN USUL SUBSIDI UNTUK PETERNAK JATIM

Madiun-Menjelang diberlakukannya sistem new normal (kenormalan baru) oleh pemerintah, Walikota Madiun Maidi memberikan beberapa usulan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kediri. Salah satunya pihaknya ingin adanya subsidi untuk menopang kesejahteraan peternak di wilayah Jawa Timur (Jatim). Dengan pola tersebut diharapkan para peternak tidak mengalami kerugian, meskipun harga ternaknya menurun.

"Diharapkan masyarakat bisa mengatasi penurunan harga, karena mereka tidak mengalami kerugian," jelasnya saat menghadiri Halal Bihalal Virtual dengan BI Kediri, di GCIO Pemkot Madiun, Selasa (2/6).

Selain itu mantan sekda kota ini juga usul agar BI Kediri segera menginventarisasi bahan kebutuhan yang diperlukan masyarakat ketika new normal telah diterapkan. Ia menambahkan antisipasi deflasi dan inflasi dilakukan sejak dini, karena menurutnya saat ini stok barang kebutuhan banyak di pasaran tapi minat



Walikota Maidi saat melakukan Halal Bihalal Virtual dengan BI Kediri, di GCIO Pemkot Madiun

pembelinya berkurang. "Jangan sampai ketika new normal diterapkan nanti, barang yang dibutuhkan masyarakat tidak ada," tuturnya.

Menurut walikota, berbagai daerah di Jatim khususnya bagian Barat merupakan daerah penghasil bahan kebutuhan pokok. Hal ini adalah keuntungan tersendiri. Sehingga seluruh daerah, baik kota maupun kabupaten di wilayah Jatim, dapat saling menguatkan. Khususnya dalam sektor ekonomi di tengah pandemic

corona.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan BI Kediri Sofwan Kurnia mengapresiasi usulan yang disampaikan oleh Walikota Maidi. Pihaknya akan segera menindaklanjuti usulan tersebut pada pertemuan selanjutnya.

"Di masa pandemi ini memang sebaiknya kita saling bersinergi untuk menguatkan daerah-daerah sekitar. Dengan sinergi yang kuat, maka New Normal akan terlewati dengan mudah," harapnya. (Sur)

PENAMBAHAN KASUS POSITIF COVID-19, JATIM DAN PAPUA SALIP DKI JAKARTA

JAKARTA - Lagi-lagi Jawa Timur (Jatim) memuncaki daftar penambahan kasus baru positif Covid-19. Papua berada diposisi kedua terbanyak. Menurut Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 hal ini terjadi karena masih banyak warga yang mengabaikan protokol kesehatan.

"Ini disebabkan ada sumber penularan di masyarakat, masih ada orang rnetan yang mengabaikan protokol kesehatan dan belum melakukan adaptasi kebiasaan yang baru," kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (2/6).

Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mencatat, terjadi penambahan 609 kasus positif Covid-19 pada Selasa (2/6) per pukul 12.00 WIB. Alhasil total kasus Covid-19 di Indonesia hingga kini berjumlah 27.549 orang positif.

Jika dirinci penambahan 609 kasus baru, Jawa Timur (Jatim) menjadi provinsi terbanyak penyumbang pasien positif dengan 213 orang. Berikutnya disusul Papua sebanyak 94 orang positif, baru DKI Jakarta 60 kasus, Sulawesi Selatan 40 kasus, dan Sumatra Selatan 24 kasus.

Yuri mengatakan, jumlah pasien sembuh juga meningkat 298 orang sehingga total ada 7.935 pasien sembuh. Pada saat bersamaan, jumlah pasien Covid-19 yang meninggal bertambah 22 orang sehingga total menjadi 1.663 orang.

Disumbang Robot

Pemerintah Pusat pun menyumbang-

kan robot bernama Autonomous UVC Mobile Robot (AUMR) sebagai sterilisasi ruang isolasi karena mampu membunuh virus penyebab penyakit Covid-19 sekaligus membantu penanganan di Jawa Timur.

"Robot ini adalah sumbangan dari hasil kerja sama Kepala Staf Presiden dan Yayasan Telkom," ujar Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pusat Doni Monardo di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Selasa (2/6) siang.

Robot tersebut 75 persennya berasal dari dari komponen lokal dan merupakan inovasi yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Robot yang senjatanya menggunakan ultraviolet tipe C itu rencananya digunakan di laboratorium maupun ruang isolasi bagi pasien positif COVID-19.

"Saya juga mendengar ada laboratorium di Surabaya yang terkontaminasi virus. Nantinya diharapkan robot ini bisa membantu," ucap pria yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tersebut.

Di tempat sama, operator AUMR, Tama, mengatakan bahwa kendali dari robot tersebut melalui jarak jauh menggunakan telepon seluler. "Robot ini seperti pengganti cairan disinfektan. Jadi, membunuh virusnya melalui sinar ultraviolet," katanya.

Di Indonesia, kata dia, saat ini masih terdapat empat unit yang dioperasikan, yakni di Wisma Atlet, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Rumah Sakit Pindad



Pemprov Jatim menerima sumbangan robot AUMR dari pemerintah pusat

Bandung dan satu lagi untuk rumah sakit di Surabaya.

Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, "Di Jawa Timur terdapat 99 rumah sakit rujukan. Ditambah RS Lapangan, maka ada 100 rumah sakit yang menangani kasus COVID-19. Kami sangat berharap dukungan dari pusat dan semoga pandemik ini segera berakhir," tuturnya.

Bantuan secara langsung diserahkan oleh Menteri Kesehatan RI dr Terawan Agus Putranto ke Gubernur Jatim serta disaksikan Ketua BNPB Doni Monardo dan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak.(ufi,ist)

PERSIAPAN NEW NORMAL, FORKOPIMDA KOTA BLITAR SIDAK 3 PASAR

Blitar - Forkopimda Kota Blitar melakukan sidak persiapan New Normal (kenormalan baru) di 3 pasar tradisional yaitu Pasar Legi, Pasar Pon dan Pasar Templek, Selasa(2/6). Ada standar protokol kesehatan yang harus dijalankan di ruang publik, yaitu mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menggunakan masker dan menjaga jarak

Tampak dalam sidak tersebut Walikota Blitar Santoso, Kapolres Blitar AKBP Leonard M Sinambela, Dandim 0808 Blitar Letkol Inf Kris Bianto, Danyon 511 Blitar Letkol Inf G Luky Ariesta dan jajaran Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Blitar.

Kapolres Blitar, AKBP Leonard M Sinambela menyampaikan TNI-Polri dalam persiapan menghadapi New Normal, perlu memperhatikan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di ruang publik. "Seperti pasar, fasilitas umum, pertokoan dan pusat keramaian lainnya," tutur AKBP Leonard.

Dijelaskannya minimal ada standar potokol kesehatan yang harus dijalankan di ruang publik, yaitu mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, mengguna-

kan masker dan menjaga jarak. "Jika tiga syarat protokol kesehatan ini dijalankan di setiap ruang publik, maka penyebaran Covid-19 bisa dicegah," jelasnya.

Termasuk meminta pengelola tempat publik untuk menyiapkan sarana protokol kesehatan, dalam menghadapi penerapan kehidupan normal baru. "Seperti rutin menyemprot desinfektan, sarana cuci tangan dan mengatur jarak antar pembeli," tegasnya.

Sementara itu Walikota Blitar, Santoso dalam sidak ingin melihat langsung kesiapan masyarakat, menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 saat menghadapi new normal atau normal baru. "Masih ada beberapa pedagang yang belum menggunakan masker, langsung saya berikan teguran baik kepada pedagang maupun pembeli," ujar Santoso sambil membagikan 1000 masker gratis.

Diungkapkan Santosi, secara bertahap Pemkot Blitar akan menertibkan pedagang yang tidak pakai masker. Diawali dulu dengan peringatan, agar memakai masker. Kedua, boleh berjualan jika memakai masker. Ketiga tindakan tegas,



Forkopimda Kota Blitar, sidak dan membagikan masker persiapan New Normal di tiga pasar tradisional.

pemkot akan menyuruh pedagang tutup kalau tetap tidak memakai masker. "Secara bertahap akan kami tertibkan, kami akan memberi sanksi kepada pedagang yang tidak pakai masker. Mereka tidak boleh jualan kalau tidak pakai masker," tegasnya.

Ditambahkan Santoso, penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 secara ketat ini penting, untuk menghadapi kehidupan normal baru. Karena selain untuk menjaga kesehatan pedagang sendiri, juga mencegah penularan di lingkungan pasar pungkasnya.(ais)



Reza Rahardian

ANTARA AKTOR DAN SUTRADARA

Masa pandemi tidak memupus harapan actor Reza Rahardian (33) untuk tetap berkarya. Reza justru berusaha untuk menantang kemampuan diri.

Meskipun hanya proyek kecil, Reza menjajal kesempatan untuk debut sebagai sutradara sekaligus pemeran Utama dalam sebuah mini seri romatic Sementara, Selamanya.

Namun, peraih Piala Citra ini mengakui menjadi sutradara bukanlah hal yang mudah. Apalagi, pengambilan gambar yang berlangsung selama tiga hari terjadi tengah adanya pembatasan social akibat pandemi Covid-19.

"Ini adalah proses yang menantang bagi saya, bagaimana mengakali shooting agar aman, apa yang harus diminimalisasi," tutur Reza dalam konferensi pers secara daring, di Jakarta.

Ia merasa repot karena turut berperan sebagai actor dan harus bisa mengolah emosi. Tetapi pada saat yang sama harus mengambil gambar.

Reza mengagumi sejumlah sutradara di Tanah Air. Beberapa disebut, antara lain: Ernest Prakasa, Joko Anwar, Hanung Bramantyo, Fajar Nugros, dan Garin Nugroho.

Namun, sebagai sutradara baru, Reza berusaha agar tidak mencari referensi

khusus untuk mencari inspirasi. Ia tak ingin visinya terhadap visualisasi cerita film terpengaruh.

"Kalau disuruh memilih jadi aktor atau sutradara, saya sudah lama menekuni peran sebagai aktor dan ingin terusterjaga," sambungnya.

"Untuk sutradara karena lingkungnya masih sama, insyaAllah kalau ada kesempatan lagi, misalnya dalam satu tahun ada tiga film, dan pada satu film itu saya jadi sutradara," tutur Reza, dikutip dari Koran Kompas (Selasa, 2/6/2020).

Reza Rahadian Matulesy atau Reza Rahardian lahir di Bogor 5 Maret 1987 anak dari pasangan Rahim dan Pratiwi Widantini Matulesy. Nama Rahadian adalah gabungan dari nama orangtuanya yang artinya anak buah hati dari Rahim dan Pratiwi, sedangkan Matulesy adalah nama keluarga sang ibu.

Reza memulai awal karier di dunia hiburan dengan menjadi seorang model. Sebelumnya, Reza berhasil meraih juara Favorite Top Guest majalah Aneka Yess tahun 2004.

Reza mengawali aktingnya lewat sinetron "Culunya Pacarku", produksi Rapi Film pada tahun 2005. Dari sinetron, Reza pun mulai mendapat beberapa tawaran bermain di film layar lebar.

Dia mengawali debut filmnya pada tahun 2007, dengan genre film horor-komedi, dan tahun berikutnya dia berakting di film horor yakni "Ghost Island 2".

Pada tahun 2009, Reza bermain film yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo berjudul Perempuan Berkalung Sorban, yang langsung mendapatkan pengakuan para kritikus film.

Melalui film Perempuan Berkalung Sorban ini, Reza berhasil meraih Piala Citra 2009 untuk kategori Pemeran Pendukung Pria Terbaik.

Menjelang akhir tahun 2012, Reza memainkan peran sebagai mantan presiden B.J. Habibie dalam sebuah film biopik arahan sutradara Faozan Rizal berjudul Habibie & Ainun. Film ini menceritakan kisah hidup dan romansa antara Habibie dan isterinya, Ainun (diperankan oleh Bunga Citra Lestari).

Reza telah memberikan representasi "sempurna" dari mantan presiden tersebut baik dalam hal sosok maupun tingkah lakunya. Pada film ini Reza meraih gelar sebagai Pemeran Utama Pria Terbaik pada Festival Film Indonesia 2013 (1st).



Foto : liputan6.com



NEW NORMAL
SEMAKIN DEKAT,
**KEBUTUHAN
MASKER
MENINGKAT**

Meluasnya penggunaan masker dapat membantu ekonomi kecil dan menengah. Saat ini, produksi masker tengah meningkat dengan pesat.

Kebutuhan diperkirakan lebih banyak lagi, apalagi jika situasi sudah normal kembali dari lockdown. Lebih-pebih jika dikaitkan dengan protokol pembatasan jarak sosial serta tindakan pencegahan lainnya.

Hal tersebut diungkapkan oleh jurnal penelitian terbaru dari The Lancet. Selain itu, risiko penularan lebih rendah di rumah tangga dan di antara kontak orang yang terinfeksi ketika masker dikenakan.

Untuk para petugas medis dalam pengaturan perawatan kesehatan, perangkat masker tipe respirator memberikan tingkat perlindungan yang lebih tinggi daripada masker bedah standar.

Para peneliti meninjau data dari 172 studi yang menilai efektivitas masker, jarak, pelindung mata dan tindakan lain dalam mencegah penularan dari pasien terkonfirmasi atau kemungkinan menderita Covid-19, sindrom pernapasan Timur Tengah (MERS), atau SARS.

"Penggunaan masker wajah universal mungkin memungkinkan pencabutan

pembatasan yang aman di wilayah yang ingin melanjutkan aktivitas normal dan dapat melindungi orang-orang di lingkungan publik yang ramai dan di dalam rumah tangga," ungkap profesor keamanan hayati global di University of New South Wales, Raina MacIntyre, seperti dikutip Bloomberg.

Penelitian ini didanai sebagian oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan dilakukan oleh para peneliti di lebih dari belasan universitas, rumah sakit, dan lembaga lainnya di negara-negara termasuk Kanada, AS, China, dan AS.

Banyak otoritas kesehatan di sejumlah negara berbeda pendapat mengenai penggunaan masker oleh masyarakat umum.

Negara-negara seperti Austria, Jerman dan Republik Ceko mengambil langkah untuk mendorong penggunaan untuk

umum

Sementara itu, negara lain seperti Inggris mengambil langkah lebih hati-hati, sebagian karena kekhawatiran terhadap kemungkinan kekurangan masker bagi tenaga kesehatan. Para peneliti menyerukan tindakan untuk meningkatkan output di seluruh dunia.

Mereka mengingatkan bahwa ada kepastian yang rendah terhadap temuan mengenai manfaat masker bagi masyarakat luas. Jarak aktivitas sosial juga memainkan peran kunci dalam mencegah penularan.

Peneliti pengungkap menjaga jarak 1 meter ketika beraktivitas bersama secara signifikan mengurangi risiko. Sementara itu, jarak yang lebih jauh dapat mengurangi kemungkinan penularan virus hingga setengahnya (Ist).





**TWITTER GUNAKAN
#DCBLACKOUT
UNTUK TANGGUHAN
RATUSAN AKUN**

Twitter Inc. menanggukkan ratusan akun yang terkait dengan penyebaran klaim palsu tentang kegagalan komunikasi selama protes di Washington.

Dilansir dari Bloomberg (Selasa, 6/6/2020), perwakilan Twitter mengatakan bahwa tindakan tersebut adalah bagian dari penyelidikan aktif terhadap tagar #dcblackout, menyusul pelanggaran kebijakan perusahaan yang melarang spam dan manipulasi platform.

Ini adalah contoh terbaru dari Twitter yang menindak pelanggaran konten sejak protes dimulai minggu lalu menyusul kematian George Floyd, seorang pria Afrika-Amerika, oleh petugas kepolisian.

Akun yang terkena tindakan tegas ini berkisar dari akun spam yang dihapus pada Senin hingga akun Presiden Donald Trump.

Pada 31 Mei, Trump me-retweet akun yang menyertakan tagar #QAnon dalam bio-nya, sebuah referensi ke grup yang meyakini adanya konspirasi yang sedang berusaha melemahkan presiden dan para pendukungnya.

Trump mem-posting ulang sebuah tweet dari akun yang mempromosikan moto grup dan memasukkan video pidato kampanye Trump. Twitter segera menanggukkan akun itu, mengatakan bahwa pemiliknya sebelumnya telah ditanggukkan dan dilarang membuat akun baru.

Twitter telah memantau akun Trump dengan cermat sejak pertama kali menerapkan label pada tweet yang melanggar kebijakan misinformasi perusahaan pada 26 Mei.

Tiga hari kemudian, Twitter memberikan pemberitahuan pelanggaran peraturan pada tweet Trump lainnya yang mengkritik aksi kekerasan di Minnesota yang berisi: "ketika penjarahan dimulai, penembakan dimulai."

Anggota Kongres Florida Matt Gaetz menjadi politisi terkemuka AS kedua yang disembunyikan teetnya di platform media sosial ini karena pelanggaran aturannya terhadap dukungan tindak kekerasan.

"Sekarang kita dengan jelas melihat Antifa sebagai teroris, dapatkah kita memburu mereka seperti kita melakukan-

nya di Timur Tengah?" ungkap Gaetz dalam tweet—nya.

Tagar #dcblackout, yang cenderung tren di AS pada hari Senin, pertama kali di-tweet oleh akun yang memiliki tiga pengikut.

Tetapi yang lain men-tweetnya sekitar 500.000 kali dalam waktu sembilan jam dari postingan awal, menurut Washington Post.

Tagar tersebut dikaitkan dengan klaim palsu bahwa pihak berwenang memblokir komunikasi untuk menghalangi pengunjung rasa.

Pada Senin pagi, Twitter juga mengambil tindakan terhadap tagar lain yang mendorong pengguna untuk berlutut di leher orang-orang, meniru tindakan petugas polisi yang dituduh melakukan pembunuhan tingkat tiga dalam kematian Floyd.

Perusahaan itu mengatakan memblokir tagar itu agar tidak muncul sebagai hasil pencarian otomatis dan juga memblokirnya dari tren (1st)..



Tetap
Tampil
Cantik

**SAAT OLAHRAGA,
INI TIPSNYA**

Olahraga dapat menyehatkan tubuh kita. Bagi kebanyakan wanita, tetap tampil cantik saat berolahraga menjadi keharusan. Walhasil bermake-up pun dilakukan. Tapi hati-hati bila tak tepat mengaplikasikannya, kulit malah akan bermasalah. Intip tips sehatnya yuk!



Di tengah pandemi virus corona (Covid-19) seperti sekarang ini, olahraga menjadi kebutuhan untuk menjaga kesehatan. Selain untuk menjaga daya tahan tubuh, olahraga juga dapat melangsingkan dan menjaga body agar tetap ideal. Namun, meski melibatkan banyak kegiatan fisik, makeup tetap tak lepas dari para wanita dalam berolahraga.

Tapi tahukah bahwa olahraga dapat menyebabkan keringat termasuk di wajah. Memadukan keringat dengan makeup adalah kombinasi yang buruk karena dapat merusak pori-pori dan menyebabkan berjerawat.

Spesialis kulit di Inggris, Patricia Boland membagikan tips bagi mereka yang merasa tetap harus perlu mengenakan makeup ketika olahraga. Pertama, pilihlah maskara dan eyeliner yang tahan air sehingga tidak terpengaruh oleh keringat.

Kedua, pilihlah foundation ringan yang bebas minyak, non-komedogenik, atau mengandung berwarna. "Gel alis sangat

bagus untuk menjaga alis tetap rapi dan bentuknya bagus. Jika membutuhkan sedikit warna di bibir, maka cobalah lip balm berwarna untuk melembapkan bibir sambil membuatnya terlihat berwarna-warni," ujarnya.

"Ada beberapa cara untuk mengatasi hal ini, hanya perlu diatur dan pastikan memiliki produk yang tepat," sambung dia

Untuk merawat kulit saat berolahraga bisa dilakukan dengan tiga cara. Pertama bersihkan kulit sebelum latihan dengan penghapus ringan atau Micellar Water dan cotton pad. Kedua, oleskan serum antioksidan yang menghidrasi setelah membersihkan kulit. "Fungsinya untuk memastikan kulit tetap terhidrasi dan terlindungi," katanya.

Ketiga, terapkan tabir surya jika berolahraga di luar. Dan yang terakhir bersihkan kulit segera setelah latihan untuk menghindari keringat dan bakteri menempel pada kulit.

Deirdre Hooper MD, seorang dokter kulit di Audubon Dermatology New Orleans mengatakan pentingnya menggunakan SPF 30 saat berolahraga. Bukan hanya saat berada di luar ruangan, penggunaan SPF saat berada dalam ruang bercahaya juga perlu dilakukan. Saat berolahraga memungkinkan kamu berkeringat sehingga carilah sunscreen yang sweatproof untuk membantumu lebih terjaga saat berolahraga. Gunakan pada bagian wajah, leher dan tubuh yang terlihat.

Seperti yang diketahui keringat merupakan tempat yang baik untuk berkembangnya bakteri. Tunggulah setelah panas tubuh mereda dan bersihkan wajah serta tubuh dari keringat. Untuk kamu yang memiliki permasalahan kulit, seperti jerawat dapat membersihkan wajah menggunakan facial wash. Jangan lupa juga untuk mengganti baju dan sepatu yang telah digunakan untuk berolahraga. Untuk kamu yang berhijab disarankan untuk mengganti setelah berolahraga. (ist)

Sabar Ini (dari hal 1)

Menteri Agama Fachrul Razi menyatakan pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan calon jemaah haji 2020. Keputusan ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. "Pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji pada 2020 atau tahun 1441 Hijriah," kata Menag dalam jumpa pers yang disiarkan langsung melalui YouTube, Selasa (2/6).

Untuk diketahui, jumlah jemaah haji asal Indonesia tahun ini mencapai 231 ribu orang. Angka ini naik dari tahun 2019 yang sebanyak 221 ribu orang.

Menag menyampaikan keputusan ini diambil dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya pemerintah Arab Saudi hingga saat ini masih belum membuka akses bagi negara mana pun terkait pandemi Corona (COVID-19). "Tidak mungkin lagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan, utamanya dalam pelayanan dan perlindungan jemaah," jelas Menag. Menag menyatakan, pemerintah telah berupaya maksimal. Namun keputusan pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji pada 2020 ini harus diambil meski pahit.

POeniadaan keberangkatan jemaah haji tahun ini bukan menjadi yang pertama sepanjang sejarah. Sebelumnya Arab Saudi juga sempat meniadakan penyelenggaraan ibadah haji. "Kita tahu Arab Saudi pernah menutup ibadah haji pada tahun 1814 karena wabah pada tahun 1837 dan 1858 karena wabah epidemi, 1892 karena wabah kolera, dan pada tahun 1987 karena wabah meningitis," terang Fachrul.

Tidak hanya dari pihak Arab Saudi, Indonesia pun pernah meniadakan pemberangkatan jemaah haji sebelumnya. Fachrul menjelaskan pada tahun 1946-1948 Indonesia meniadakan pemberangkatan jemaah haji karena agresi militer Belanda.

Fachrul menerangkan berdasarkan Undang Undang (UU), keselamatan jemaah haji harus diutamakan. Oleh karena itu keputusan peniadaan keberangkatan jemaah haji tahun ini diambil oleh pemerintah. Salah satu poin penting dari keputusan tersebut adalah bahwa jemaah haji untuk tahun keberangkatan tahun 2020, secara otomatis terdaftar menjadi jemaah haji di tahun 2021.

Selain itu jemaah yang tertunda berangkat haji hingga tahun depan ini akan mendapat dana manfaat senilai Rp 6 juta - Rp 16 juta dari pelunasan haji. Dana manfaat ini akan diterima oleh jemaah haji setidaknya 30 hari sebelum keberangkatan haji 1442 H atau 2021. "Diberikan secara perorangan. Yang paling rendah Rp 6 jutaan dengan uang muka Rp 25 juta dari Aceh. Sedangkan paling tinggi Rp 16 juta untuk embarkasi dari Makassar," kata Fachrul.

Nilai manfaat ini diberikan kembali kepada jemaah berdasarkan biaya ibadah perjalanan ibadah haji (Bipih) yang dibayarkan. Kendati begitu, pemerintah juga memberikan keleluasaan bagi jemaah yang ingin menarik kembali uang setoran. Hal

sama berlaku bagi pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) pada penyelenggaraan haji tahun ini. Statusnya dinyatakan batal seiring terbitnya KMA ini. Bipih yang dibayarkan akan dikembalikan. KBIHU dapat mengusulkan nama pembimbing pada penyelenggaraan haji mendatang.

Selain Indonesia, negara yang juga memilih untuk membatalkan keberangkatan Haji 2020 akibat Corona Covid-19 adalah Singapura. Singapura telah memutuskan untuk menunda keberangkatan jemaah haji 2020 untuk 900 orang hingga 2021, menurut Dewan Agama Islam Singapura (Muis). Muis dalam sebuah pernyataan hari ini mengatakan keputusan itu dibuat dengan persetujuan Komite Fatwa Singapura dan melalui konsultasi dengan Departemen Kesehatan.

Terpisah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta para calon jemaah haji yang batal berangkat tahun ini untuk bersabar. Ridwan Kamil pun tahun ini seharusnya menjadi Amirul Hajj. "Luar biasa sedih, karena saya akan berangkat juga sebagai Amirul Hajj, lahir bathin sudah siap. Kalau tahun lalu Pak Uu, ternyata Allah men-takdirkan lain, saya tidak berangkat juga artinya seluruh rombongan haji Jawa Barat dengan berat hari kami sampaikan berita ini. Tapi bersyukurlah saat di atas dan bersabarlah saat dibawah," ucapnya.

Kasi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh, Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Blitar Syaikul Munib mengatakan hal senada. "Karena sudah diputuskan sebanyak 1.000 orang CJH di Kabupaten Blitar ya tidak berangkat. Sebenarnya persiapan sudah diberikan tinggal menunggu pemberangkatan. Termasuk Vaksin Meningitis," katanya.

DPR Meradang

Terpisah, Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad meminta Fachrul Razi belajar banyak dan lebih memahami regulasi pelaksanaan Haji dan Umrah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

"Di situ jelas disebutkan mitra kerja dalam hal ini DPR, Komisi VIII. Menyangkut dengan pembatalan keberangkatan Calon Jemaah Haji Indonesia 2020, itu harus dibicarakan dulu. Soalnya beberapa kali kita rapat, beberapa kali kita mendesak kepastian itu (pemberangkatan CJH), Menteri Agama mengulur terus, dan kita selalu menunggu. Kemudian tiba-tiba diputuskan sepihak saja," ungkap Achmad.

Achmad menyayangkan ketidak-pahaman Menag terkait mitra kerja. Ia menambahkan, Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa DPR. Andaikata pembatalan ini sudah dibicarakan sebelumnya dengan Komisi VIII, saat mengumumkan pembatalan Menag bisa didampingi oleh Ketua Komisi VIII DPR RI. Sehingga akan nampak kekompakan antara mitra kerja. Kemudian bila ada per-

masalah, seluruh Anggota Komisi VIII DPR bisa turut menjelaskan kepada masyarakat.

"Walaupun pemerintah Arab Saudi membatalkan pelaksanaan Ibadah Haji, Pemerintah juga jangan langsung mengumumkan, harus ada raker dengan DPR dulu. Agar bisa dicarikan jalan keluar bersama-sama untuk meredam gejolak," tutur Achmad.

Sementara Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menilai pembatalan itu adalah langkah yang tepat. "Keputusan Pemerintah tentang pembatalan haji 1441 H merupakan langkah yang tepat dan tepat waktu," kata Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti.

Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Andi Najmi Fuad mengatakan hal senada. "Menurut saya keputusan pemerintah sangat bijak, melihat situasi dan kondisi yang tidak bisa menjamin keselamatan dan kenyamanan jemaah haji," katanya. (ist,ins)

KUOTA HAJI INDONESIA 1441H/2020M

| | |
|------------------|-------------------|
| • Aceh 4.378 | • NTT 688 |
| • Sumut 8.328 | • Kaltara 416 |
| • Sumbar 4.613 | • Kalbar 2.519 |
| • Riau 5.047 | • Kalteng 1.612 |
| • Jambi 2.909 | • Kaltim 2.586 |
| • Sumsel 7.050 | • Kalsel 3.818 |
| • Bengkulu 1.636 | • Gorontalo 978 |
| • Lampung 7.050 | • Sulut 713 |
| • Babel 1.065 | • Sulteng 1.993 |
| • Banten 9.461 | • Sulsel 7.272 |
| • DKI 7.926 | • Sultra 2.019 |
| • Jabar 38.723 | • Maluku 1.076 |
| • Jateng 30.377 | • Maluku 1.086 |
| • DIY 3.147 | • Papua Barat 723 |
| • Jatim 35.152 | • Papua 1.076 |
| • Bali 968 | |
| • Ntb 4.499 | |

LAMA ANTRIAN JEMAAH HAJI INDONESIA rata-rata per provinsi (tahun)

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|---|------------------------------|--|
| 11 MALUKU | 12 GORONTALO SULUT | 15 KALBAR MALUKU UTARA PAPUA BARAT | 16 BENGKULU | 17 SUMUT KEP. RIAU LAMPUNG JABAR SULTENG |
| 18 SUMSEL | 19 NTT SUMBAR | 20 KEP. BANGKA BELITUNG | 21 DKI JAKARTA KALTENG | 22 BALI |
| 24 JAMBI JATENG KALTIM | 25 D.I.Y KALTIM | 26 RIAU BANTEN SULBAR SULTRA PAPUA | 28 ACEH JATIM | 28 NTB |
| 29 SULSEL | | | | 31 KALSSEL |



JAGA ANGKA KELAHIRAN SAAT PANDEMI COVID-19

PEMKAB PASURUAN GRATISKAN BIAYA PELAYANAN KB



Pelayanan KB digratiskan di Kabupaten Pasuruan selama pandemi Covid-19

Pasuruan- Kekhawatiran pemerintah akan adanya ledakan angka kelahiran atau baby boom saat pandemi virus Covid-19, langsung diantisipasi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan. Pemkab terus mengimbau pasangan usia subur untuk mengendalikan kehamilan.

Bahkan, dalam rangka mempertahankan angka kelahiran dan menjaga kelestarian peserta KB aktif selama Pandemi Covid-19, Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Pembebasan biaya pelayanan peserta ber-KB.

Surat Edaran ini bernomor 900 / 992 /

424.080 / 2020 tertanggal 29 Mei 2020 tentang Pembebasan biaya pelayanan peserta ber-KB selama masa tanggap darurat Covid-19 di Kabupaten Pasuruan.

Dalam SE tersebut, pelayanan peserta KB aktif dan peserta KB baru selama Pandemi Covid-19 tetap diadakan sesuai standar social and physical distancing. Tak hanya itu saja, Pemkab Pasuruan juga menggratiskan biaya pelayanan ber-KB bagi ibu rumah tangga maupun pasangan usia subur (PUS). Seperti pemasangan dan pelepasan IUD, pelayanan suntik KB, penanganan komplikasi KB, serta pemasangan dan pelepasan implant.

Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (KB-PP) Kabupaten Pasuruan, Loembini Pedjati Lajoeng mengatakan, pembebasan biaya pelayanan peserta ber-KB dimulai sejak 29 Mei dan terus berlaku selama Pandemi Covid-19.

Kegiatan ini dilaksanakan di Puskesmas se-Kabupaten Pasuruan dan RSUD Bangil dan Grati. Hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat yang ingin menunda kehamilan di tengah Pandemi, dengan cara ber-KB.

"Di tengah pandemi Covid-19, pasti ada PUS yang menunda kehamilan. Faktornya ya

macam-macam, sehingga dari Pemkab Pasuruan membantu untuk membebaskan biaya pelayanan peserta yang ingin ber-KB. Yang ingin pasang IUD, Implant atau suntik, gratis semuanya sampai waktu yang tidak bisa ditentukan," kata Loembini, saat ditemui di kantornya, Selasa (02/06).

Untuk itu, Loembini juga meminta kesadaran pasangan usia subur agar mau ke Puskesmas dan RS untuk mengikuti KB. Hal yang mendasari imbauan di tengah pandemi Covid-19 ini adalah adanya anjuran Work From Home (WFH) dan social distancing yang membuat PUS banyak menghabiskan waktu di rumah. Sehingga kemungkinan besar terjadi peningkatan angka kehamilan.

Di samping itu, dari sisi kesehatan secara fisik dan psikis, ibu hamil dan bayinya berpotensi lebih rentan. Lantaran kondisi emosional sang ibu yang bisa saja berubah sebagai dampak pandemi Covid-19.

"Ini hanya imbauan saja. Kalaupun PUS ingin memiliki anak di tengah pandemic, ya ini sah-sah saja. Kami hanya menyarankan supaya kalaupun hamil, dijaga betul kesehatannya, periksa kehamilan secara berkala, asupan gizi bagi ibu dan bayi yang dikandungnya harus diperhatikan betul, dan ibu juga tidak boleh stress," harapnya. (adv)



Jakarta- Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah menyiapkan rancangan aturan soal metode kampanye Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19. Komisiner KPU Viryan Aziz mengatakan, KPU akan melarang kegiatan rapat umum di masa kampanye Pilkada Serentak 2020.

KPU, kata Viryan, akan mengikuti rekomendasi Gugus Tugas agar melaksanakan setiap proses pelaksanaan pilkada dengan standar COVID-19. Dengan demikian, kampanye akbar atau rapat umum yang melibatkan banyak orang hanya bisa dilakukan secara online.

"Sampai diskusi tadi malam seperti apa yang disuarakan sejumlah pihak, tidak melakukan atau bahkan cenderung melarang kegiatan kampanye rapat umum. Rapat umum yang dimaksud adalah dalam jumlah massal, ada panggungnya, ada lapangan, dan itu tidak mungkin tidak terjadi interaksi fisik," kata Viryan, Selasa (2/6). "Sebagai alternatifnya kita mendorong ini sedang kita atur, kampanye rapat umum secara online," imbuhnya.

PILKADA SERENTAK 2020 NEW NORMAL

KAMPANYE AKBAR DIGELAR ONLINE

Viryan menjelaskan, selama pandemi terjadi, banyak acara-acara yang dilakukan secara daring dan tetap mengundang perhatian orang banyak. Misalnya, kata dia, konser almarhum Didi Kempot dan konser #dirumahaja Najwa Shihab. Hal itu yang kemudian disarankan KPU kepada pasangan calon agar menggelar kampanye akbar secara daring.

"Misalnya, kan biasanya kampanye rapat umum itu ada artis-artis nyanyi, nah sekarang kan lagi musim konser dari rumah misalnya, ya kan bisa. Artinya kita beralih kepada pendekatan seperti biasa dilakukan secara daring. Dan itu dimungkinkan karena sudah berlangsung," jelasnya.

Menurut Viryan, jika kampanye akbar tetap digelar seperti biasa, maka akan terjadi kontak fisik dalam jumlah besar. Dan hal ini dikhawatirkan akan membahayakan banyak orang karena potensi penyebaran virus corona makin besar. "Inilah bisa disebut pilkada new normal. Jadi kalau pilkada kampanye rapat umum di lapangan terbuka itu pilkada out normal," tegas Viryan.

Sebelumnya, KPU bersama pemerintah dan DPR telah menetapkan Pilkada Serentak 2020 akan digelar pada 9 Desember mendatang. Dan masa kampanye akan berlangsung sejak 26 September hingga 5 Desember 2020.

KPU pun telah menyusun revisi Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan, Program, dan

Jadwal Pilkada 2020. Dalam draf yang tinggal finalisasi itu, masa kampanye diagendakan pada September sampai Desember 2020.

Dikutip dalam draf yang sudah dibahas bersama Kemendagri, Kemenkes, Bawaslu, dan lainnya pada Minggu (31/5) itu, masa kampanye bagi 270 Pilkada digelar pada 26 September sampai 5 Desember.

Sementara kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik digelar pada 22 November-5 Desember 2020. Selanjutnya masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye pada 6-8 Desember 2020. (ist)

DRAF REVISI PKPU
TENTANG PILKADA 2020

- 26 September - 5 Desember : Kampanye bagi 270 Pilkada
- 22 November - 5 Desember 2020 : Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik.
- 6-8 Desember 2020 : Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye
- 9 Desember 2020 : Pemungutan dan penghitungan suara di TPS
- 13 Desember-17 Desember 2020 : Rekapitulasi & penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pilwalkot dan Pilgub
- 16-20 Desember : Rekapitulasi untuk Pilgub di KPU Provinsi